

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanasan global dan perubahan cuaca menjadi suatu topik yang penting untuk dibahas oleh beberapa negara dan menjadi sebuah permasalahan dalam lingkungan. Pemanasan global adalah fenomena meningkatnya suhu dari tahun ke tahun karena terjadi efek rumah kaca yang diakibatkan oleh meningkatnya emisi gas seperti karbon dioksida (CO_2). Pemanasan global ini dapat menyebabkan permasalahan serius bagi lingkungan seperti tsunami, banjir, longsor, kekeringan yang menyebabkan peningkatan potensi terbakarnya hutan, dan perubahan iklim. Pemanasan global yang berbahaya dapat disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas penduduk bumi dimana yang paling berbahaya diakibatkan karena emisi karbondioksida (CO_2) seperti deforestasi hutan, penggunaan bahan bakar fosil, peningkatan jumlah industri, dan proses alam seperti pernapasan maupun letusan gunung api (Putri Halimah & Yanto, 2018).

Semakin berkembangnya industri di berbagai negara mengakibatkan semakin maju perekonomian dunia. Namun dibalik perkembangan tersebut, terdapat dampak negatif yang terjadi yaitu kualitas lingkungan yang menurun dan meningkatnya emisi gas rumah kaca yang salah satunya disebabkan oleh emisi karbon. Banyak kegiatan dari berbagai industri perusahaan yang berpengaruh terhadap lingkungan seperti penghasilan limbah yang tidak dikelola dengan baik dan mengakibatkan pencemaran udara, air, maupun tanah yang dapat berbahaya bagi makhluk hidup di sekitar kawasan industri (Saptiwi, 2019).

Emisi karbon merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global dan memicu perubahan iklim dimana aktivitas manusia merupakan penyumbang terbesar emisi karbon tersebut sehingga bumi sulit menyerap karbon dan jumlah karbon menjadi tidak wajar. Dengan adanya pemanasan global dan perubahan iklim ini akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting

diadakannya pengurangan emisi karbon sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketidakstabilan ekonomi akibat perubahan iklim (Angelina & Handoko, 2023).

Nastiti & Hardiningsih (2022) menyatakan bahwa permulaan adanya gerakan untuk menangani isu pemanasan global ini dengan diciptakannya sebuah konvensi Internasional yang dikenal dengan Protokol Kyoto yang diciptakan oleh *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Kyoto, Jepang pada tahun 1997. Protokol Kyoto merupakan amandemen yang memiliki tujuan untuk mengontrol dan mengurangi gas rumah kaca di atmosfer agar terjaga dalam tingkatan yang tidak menimbulkan efek negatif terhadap sistem iklim bumi karena perubahan iklim belakangan ini terjadi diakibatkan oleh akumulasi penggunaan energi fosil sejak revolusi industri tahun 1850 dimana kontribusi emisi terbesar yaitu karbon dioksida (CO_2).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa lebih dari 78% kejadian bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi dan hanya sekitar 22% merupakan bencana geologi. Bencana hidro meteorologi berupa kejadian banjir, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, tanah longsor, dan cuaca yang ekstrim dimana perubahan iklim menjadi penyebab peningkatan bencana hidrometeorologi. Salah satu kejadian bencananya yaitu kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan pada tahun 2022 dan tanah longsor di Kabupaten Agam Sumatera Barat pada tahun 2023. Penyimpanan karbon dunia semakin mengecil seiring dengan hancurnya lahan gambut di Indonesia karena perubahan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan industri kertas. Hal ini sangat perlu dipertimbangkan oleh tiap perusahaan di Indonesia untuk mengatasi masalah dalam pemanasan global dan perubahan iklim dan menerapkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar (P. C. Pratiwi & Sari, 2016).

Upaya Indonesia untuk mengurangi emisi karbon yaitu dengan mengesahkan Protokol Kyoto pertama pada 28 Juni 2004 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 dalam rangka dilaksanakannya pembangunan berkelanjutan serta ikut serta dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Selain itu, Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca sebagai dasar

pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca dimana pada pasal 4 disebutkan bahwa para pelaku usaha ikut andil dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan melakukan pengungkapan emisi karbon serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. (Putri Halimah & Yanto, 2018).

Data dari *Climate Watch* yang bersumber dari *Consumer News and Business Channel* (CNBC) Indonesia, Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang mencakup emisi karbon secara global paling banyak di sumbangkan oleh sektor energi. Sektor energi menghasilkan 36,44 gigaton karbon dioksida ekuivalen ($Gt CO_2e$) atau 71,5 % dari total emisi. Berdasarkan laporan *Ember Climate* yang berjudul *Global Electricity Review 2023*, emisi yang berasal dari pembangkit listrik meningkat sebesar 12.431 juta ton CO_2 ($mtCO_2$) pada tahun 2022.

Gambar 1.1 Emisi Gas Rumah Kaca Global Terbesar Berdasarkan Sektor



Sumber : *Climate Watch*, 2023

Laporan dari *Ember Climate* tersebut menunjukkan Indonesia sendiri telah menduduki urutan ke 9 pada negara yang memicu banyaknya emisi karbon di dunia berdasarkan sektor energi pada tahun 2022 sebanyak 192,7 $mtCO_2$ atas emisi karbon dioksida yang telah diproduksi. Emisi karbon dari sektor energi yaitu berupa hasil pembakaran minyak, gas, dan bara. *Low Carbon Development Indonesia* (LCDI) menyatakan sektor energi merupakan sektor penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar dalam ruang lingkup global. Bagi Indonesia yang

memiliki proporsi energi fosil mencapai hampir 90% dalam bauran energi primer, dekarbonisasi sangat penting untuk dilakukan. Adapun hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas menyimpulkan bahwa mulai tahun 2022, sektor energi akan menggantikan sektor kehutanan sebagai penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Sektor energi dan transportasi mendominasi emisi dengan persentase sebesar 50,6% (potensi sebesar 1 Giga Ton CO_2) dari total emisi di Indonesia pada tahun 2022. Potensi emisi akan terus meningkat hingga di tahun 2030, dimana persentase emisi dari sektor energi diprediksi akan menyentuh angka 1,4 Giga Ton CO_2 .

Sesuai dengan data yang tertera, maka sangatlah penting bagi Indonesia untuk mengurangi emisi karbon penyebab pemanasan global dan perubahan iklim yang bahkan sudah memasuki tahap urgensi. Berdasarkan pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* diperintahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* sendiri merupakan sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% melalui kerja sama internasional, dimana sektor energi dengan target 11% untuk mengurangi emisi. Hal ini terdapat dalam dokumen kontribusi yang ditentukan secara nasional atau yang disebut *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan tidak terpisahkan dari dari ratifikasi Persetujuan Paris dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2016. Dari peraturan-peraturan yang ada maka pengurangan emisi karbon sangat penting untuk dilakukan demi mengurangi pemanasan global dan perubahan iklim.

Suatu perusahaan yang melaporkan pengungkapan emisi karbon selain untuk mengurangi pemanasan global juga dapat dilihat oleh para pengguna laporan keuangan sebagai suatu tanggung jawab suatu perusahaan sebagai solusi permasalahan pemanasan global yang terjadi (Choi dkk, 2013). Pengungkapan emisi karbon merupakan suatu pengungkapan informasi tentang emisi karbon yang bertujuan sebagai pertimbangan para pengguna laporan keuangan saat memprediksi

keberlanjutan perusahaan dan sebagai pedoman bahwa kegiatan perusahaan tersebut sudah mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan (Bahriansyah & Lestari Ginting, 2022).

Pengungkapan emisi karbon menjadi kontribusi perusahaan terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Aktivitas perusahaan yang tidak dapat dipisahkan dari dampak pada lingkungan membuat perusahaan dituntut untuk melakukan transparansi terkait pengungkapan lingkungan khususnya pengungkapan emisi karbon. Perusahaan yang mengungkapkan emisi karbon akan menghasilkan pandangan yang positif bagi para pemangku kepentingan karena perusahaan akan dianggap lebih konsisten terhadap peran dan tanggungjawabnya dalam aspek sosial maupun lingkungan (Angelina & Handoko, 2023).

Pengungkapan emisi karbon berkaitan erat dengan ilmu akuntansi terutama dalam konteks keberlanjutan dan tanggung jawab sosial maupun lingkungan perusahaan, dimana dalam melaksanakan keberlanjutan harus mencakup ilmu akuntansi di dalamnya yaitu akuntansi lingkungan. Perusahaan yang mengungkapkan informasi terkait emisi karbon dalam laporan perusahaan akan memberikan informasi yang lebih transparan tentang dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan tersebut. Selain itu, pengungkapan emisi karbon juga memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola risiko lingkungan dan peluang bisnis yang berkaitan dengan perubahan iklim. Dengan demikian pengungkapan emisi karbon merupakan bagian yang penting dalam praktik akuntansi berkelanjutan dan akuntansi lingkungan yang nantinya akan semakin diakui nilainya dalam dunia bisnis (Asmaranti dkk, 2018).

Topik pengungkapan emisi karbon ini juga memiliki keterkaitan yang erat terhadap akuntansi lingkungan, dimana menurut Sambharakreshna (2009) akuntansi lingkungan mengukur, mengidentifikasi, dan menginformasikan terkait kegiatan lingkungan perusahaan dimana dalam hal ini informasi di laporkan pada laporan keberlanjutan salah satunya melalui pengungkapan emisi karbon. Perusahaan yang mengungkapkan informasi terkait lingkungan yang salah satunya emisi karbon akan menunjukkan komitmennya dalam bertanggung jawab terhadap

lingkungan dan dalam hal ini dapat melibatkan konsep akuntansi lingkungan dengan menyediakan kerangka kerja untuk mengukur biaya terkait emisi karbon.

Dalam mengurangi masalah lingkungan emisi karbon tersebut, peran pihak internal seperti dewan perusahaan sangat penting untuk mendukung aksi dari pengurangan emisi karbon. Barisan dewan perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan suatu keputusan untuk kemajuan perusahaan, dimana keputusan yang baik juga akan melibatkan kinerja yang berkelanjutan dengan efektif (Kristanto & Lasdi, 2022). Isu terkait gender saat ini merupakan isu yang sedang banyak diteliti oleh para peneliti seperti di Indonesia. Terlebih lagi keberadaan serta peran gender perempuan dalam perusahaan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja perusahaan dimana dengan adanya perempuan dapat membantu proses peningkatan kinerja perusahaan (Thoomaszen & Hidayat, 2020).

Menurut Post dkk (2011) keberagaman gender dalam dewan perusahaan dapat meningkatkan berbagai macam ide dan pengetahuan yang dapat diperhitungkan pada saat mengambil keputusan. Perusahaan dinilai dapat memberikan keadilan dalam perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada siapapun tanpa pandang gender dan tidak adanya diskriminasi untuk menjadi dewan perusahaan karena dengan adanya komposisi perempuan di dewan perusahaan tersebut (Kristina & Wiratmaja, 2018). Adanya keberagaman gender dapat meningkatkan struktur tata kelola perusahaan karena melibatkan diskusi antar setiap gender dalam keputusan yang akan diambil. Keberagaman gender mampu meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam pengambilan keputusan yang membantu perusahaan untuk melakukan kegiatan yang berkelanjutan dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki keberagaman gender (Kristanto & Lasdi, 2022)

Trufvisa & Ardiyanto (2019) menyatakan perempuan dianggap lebih mementingkan kepentingan umum dan kualitas hidup daripada kepentingan pribadi sehingga dengan adanya perempuan dalam jajaran dewan perusahaan akan meningkatkan tanggungjawab dalam lingkungan. Oleh karena itu, adanya perempuan dalam dewan perusahaan akan memberikan dampak positif pada masalah lingkungan dan meningkatkan transparansi pengungkapan emisi karbon

pada suatu perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa keberagaman gender merupakan adanya kesetaraan dalam perusahaan dengan melibatkan perempuan dalam jajaran dewan perusahaan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dimana perempuan dinilai lebih mementingkan isu terhadap lingkungan sehingga perusahaan yang memiliki jajaran dewan perusahaan perempuan yang tinggi akan lebih mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan perusahaan.

Kehadiran wanita dalam jajaran direksi akan memperagam perspektif dalam pengambilan keputusan terkait keberlanjutan perusahaan sehingga akan memaksimalkan perusahaan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Wanita dalam dewan direksi juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan karena cenderung lebih peka terhadap aspek sosial maupun lingkungan dalam laporan perusahaan yang dapat mencerminkan tanggung jawab perusahaan yang baik terhadap sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, dewan direksi wanita juga berkaitan dengan konsep akuntansi keberlanjutan yang mementingkan dampak sosial maupun lingkungan dari suatu bisnis dan dewan direksi wanita penting dalam pengambilan suatu keputusan dalam perusahaan khususnya terhadap tanggung jawab lingkungan yang tinggi yang dicerminkan dengan adanya pengungkapan emisi karbon (Kristanto & Lasdi, 2022).

Keberagaman gender dengan adanya dewan direksi wanita dapat mempengaruhi transparansi pengungkapan emisi karbon ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Liao dkk (2015) dimana penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan perempuan dalam suatu perusahaan memiliki pengaruh yang besar dalam pengungkapan emisi karbon. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ben-Amar dkk (2017), Hollindale dkk (2019), dan Saraswati dkk (2021) yang menunjukkan bahwa keberagaman gender berupa partisipasi dewan perempuan memiliki pengaruh positif dengan pengungkapan emisi karbon serta meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan pemangku kepentingan dan mendorong penerapan keberlanjutan perusahaan. Namun ada juga penelitian terkait keberagaman gender yang tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian yang dilakukan oleh Trufvisa & Ardiyanto (2019), Kristanto & Lasdi

(2022), dan Verginia dkk (2022) menunjukkan bahwa keberadaan dewan perempuan dalam perusahaan tidak berpengaruh dalam pengungkapan emisi karbon.

Kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh institusi atau pihak lain seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan manajemen aset (W. N. Sari & Rani, 2015). Kepemilikan ini mempunyai fungsi untuk mengawasi dan mengendalikan pihak manajemen secara efektif (Krisnando, 2017). Pengawasan oleh pihak investor institusional akan semakin ketat dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi dan hal ini akan membuat perusahaan terhindar dari perilaku mencari keuntungan pribadi menggunakan kekuasaan dari pihak manajemen perusahaan (W. N. Sari & Rani, 2015). Dengan adanya kepemilikan institusional yang mengawasi berjalannya pihak manajemen dengan maksimal akan mendorong transparansi pengungkapan tanggung jawab lingkungan melalui pengungkapan emisi karbon dengan tujuan untuk menciptakan citra yang positif bagi perusahaan (Akhiroh & Kiswanto, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Amaliyah & Solikhah (2019), Almuaromah & Wahyono (2022), dan Angelina & Handoko (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional mampu mempengaruhi perusahaan untuk lebih terbuka dalam pengungkapan emisi karbon dengan adanya pengawasan oleh institusi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Halimah & Yanto (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh pada pengungkapan emisi karbon, namun penelitian tersebut menunjukkan hasil kepemilikan insitusional berpengaruh negatif, dimana kepemilikan institusional yang tinggi justru mendorong perusahaan untuk mengurangi pengungkapan emisi karbonnya dengan alasan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mustar dkk (2020) dan N. A. Putri dkk (2022) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Kinerja lingkungan merupakan tanggungjawab perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik dimana mengenai dampak lingkungan dari aktivitas operasi perusahaan tersebut (Bahri & Cahyani, 2016). Selain itu, kinerja

lingkungan merupakan kemampuan perusahaan untuk mewujudkan lingkungan sekitar perusahaan yang hijau dan bersih (Amaliyah & Solikhah, 2019). Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik akan semakin transparan dalam melakukan pengungkapan lingkungannya (Majid & Ghozali, 2015). Oleh karena itu, kinerja lingkungan yang baik berarti memiliki tanggungjawab lingkungan yang tinggi mengenai dampak dari kegiatan operasional perusahaan dimana hal ini akan semakin mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon dengan maksimal.

Kinerja lingkungan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Saptiwi (2019) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kinerja lingkungan yang dimiliki perusahaan akan semakin meningkatkan pengungkapan emisi karbon yang dilakukan perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya & Yulianto (2018) dan Hilmi dkk (2020) yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan yang tinggi dalam suatu perusahaan akan memotivasi perusahaan dalam melakukan pengungkapan lingkungan seperti emisi karbon secara lebih luas. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah & Muid (2014), Amaliyah & Solikhah (2019), dan Angelina & Handoko (2023) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon dengan menunjukkan bahwa semakin tinggi kinerja lingkungan dapat mengurangi motivasi perusahaan dalam mengungkapkan emisi karbon perusahaan tersebut.

Komite audit adalah komite yang dibuat oleh dewan komisaris untuk mengawasi prinsip *good corporate governance* khususnya dalam transparansi pengungkapan di laporan tahunan. Selain itu komite audit dibentuk agar mencegah perbuatan menyimpang dari pengelola perusahaan melalui aktivitas pengawasan (D. F. Hartono & Nugrahanti, 2014). Dengan adanya pengawasan oleh komite audit akan memotivasi perusahaan untuk meningkatkan transparansi dari kegiatan operasi perusahaan yang dilakukan dan melakukan pengungkapan. Semakin sering komite audit melakukan rapat maka akan semakin sering pula komite audit melakukan evaluasi terhadap pengungkapan dan tanggung jawab lingkungan perusahaan

(Aniktia & Khafid, 2015). Hal ini akan mendorong perusahaan semakin terbuka dalam melakukan pengungkapan emisi karbon.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Angelina & Handoko (2023), Saptiwi (2019), dan Amaliyah & Solikhah (2019) menunjukkan bahwa semakin seringnya komite audit melakukan rapat maka akan semakin banyak ide yang dapat menentukan keputusan yang akan diambil dalam memaksimalkan kepentingan para *stakeholder* perusahaan yang salah satunya dengan melakukan pengungkapan emisi karbon. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh K. P. Sari & Susanto (2021) yang menunjukkan hasil komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas menunjukkan bahwa masih terdapat adanya *research gap* pada penelitian yang pernah dilakukan dimana dapat dilihat dengan tidak konsistennya hasil penelitian. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Angelina & Handoko, 2023) yang meneliti tentang kepemilikan institusional, komite audit, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon. Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian rujukan. Perbedaan pertama, penelitian Angelina & Handoko (2023) menggunakan tiga variabel independen dalam mempengaruhi pengungkapan emisi karbon yaitu kepemilikan institusional, komite audit, dan kinerja lingkungan. Sedangkan penelitian ini menggunakan empat variabel independen dalam mempengaruhi pengungkapann emisi karbon dimana terdapat penambahan variabel berupa keberagaman gender berdasarkan penelitian oleh Trufvisa & Ardiyanto (2019) tentang keberagaman gender dalam jajaran direksi terhadap pengungkapan emisi karbon. Perbedaan kedua, penelitian Angelina & Handoko (2023) menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur di Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan sektor energi di Indonesia karena sektor ini merupakan sektor terbesar yang menyumbangkan emisi karbon baik secara global maupun di Indonesia sendiri dan sektor ini berperan penting dalam pengurangan emisi karbon untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Perbedaan ketiga, penelitian Angelina & Handoko

(2023) dilakukan pada tahun 2017-2020, sedangkan pada penelitian ini periode penelitian dilakukan pada tahun 2019-2022.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon dengan mengambil judul **PENGARUH KEBERAGAMAN GENDER, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KINERJA LINGKUNGAN, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI KARBON (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022).**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan menganalisis Pengaruh Keberagaman Gender, Kepemilikan Institusional, Kinerja Lingkungan, dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022). Maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Apakah Keberagaman Gender, Kepemilikan Institusional, Kinerja Lingkungan, dan Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?
2. Apakah Keberagaman Gender berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?
4. Apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?

5. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Keberagaman Gender, Kepemilikan Institusional, Kinerja Lingkungan, dan Komite Audit terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Keberagaman Gender terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022
3. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi Peneliti
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bagi peneliti yaitu sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait pengungkapan yang sebaiknya dilakukan perusahaan terkait emisi

karbon yang dapat mengurangi pemanasan global dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi Akademisi

Manfaat yang diperoleh bagi akademisi yaitu penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan terkait pengaruh keberagaman gender, kepemilikan institusional, kinerja lingkungan, dan komite audit terhadap pengungkapan emisi karbon.

3. Bagi Perusahaan

Manfaat yang diperoleh bagi perusahaan yaitu menambah pengetahuan dan mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan tanggung jawab lingkungan dengan melakukan pengungkapan emisi karbon untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan pemanasan global.

4. Bagi Investor

Manfaat yang diperoleh bagi para investor yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan para investor dapat menggunakannya sebagai masukan dalam melakukan pertimbangan keputusan saat akan berinvestasi ke sebuah perusahaan khususnya perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon yang menunjukkan tanggung jawab lingkungan yang tinggi.